

# **LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT**

**HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
KELAS I A KHUSUS  
TRIWULAN II TAHUN 2026**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017**



## LEMBAR PENGESAHAN

## LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT

**HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI MAKASSAR  
KELAS IA KHUSUS  
TRIWULAN II TAHUN 2026**

**Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi  
Nomor 14 Tahun 2017**

Disahkan di Makassar  
Pada Hari Rabu, 1 Juli 2026



**Top Management,**

**Dr. I WAYAN GEDE RUMEGA, S.H., M.H.**  
**NIP. 196807181994031005**

**Sekretaris Tim Survei,**

**NURIYA AWAD, S.H.**  
**NIP. 197503302000032002**

**Ketua Tim Survey,**

**FITRIAH ADE MAYA, S.H.**  
**NIP. 197609292001122003**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga kami Tim Survey Pengadilan Negeri Makassar mampu menyelesaikan Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN II TAHUN 2026.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang dapat diartikan bahwa kepuasan pelanggan dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini menanyakan pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus , yang diambil secara elektronik dengan menggunakan Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER).

Semoga hasil laporan ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan dan bermanfaat bagi upaya peningkatan kualitas pelayanan seluruh unit pelayanan di Pengadilan Negeri Makassar.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Makassar, 1 Juli 2026

**Tim Survei**

DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL .....1**

**KATA PENGANTAR.....3**

**DAFTAR ISI .....4**

**BAB I PENDAHULUAN .....5**

    A. Latar Belakang ..... 5

    B. Tujuan dan Sasaran..... 6

    C. Prinsip..... 6

    D. Pelaksanaan ..... 7

    E. Tahapan Pelaksanaan..... 7

**BAB II HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN .....8**

**BAB III RENCANA TINDAK LANJUT 3 (TIGA) UNSUR TERENDAH HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI .....10**

**BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI.....12**

    A. Kesimpulan..... 12

    B. Rekomendasi..... 13

**RUJUKAN: .....14**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN. ....15**

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Makassar berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Maksud Penyusunan Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Rencana Tindak Lanjut Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

## **C. Prinsip**

Dalam melaksanakan Survey Kepuasan Persepsi Anti Korupsi dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

### **1. Transparan**

Hasil Survei Persepsi Anti Korupsi harus dipublikasikan pada website resmi Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat

### **2. Partisipatif**

Dalam melaksanakan survey melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survey yang sebenarnya

### **3. Akuntabel**

Hal-hal yang diatur dalam Survey Persepsi Anti Korupsi harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku

### **4. Berkesinambungan**

Survey Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan

#### 5. Keadilan

Pelaksanaan Survey Persepsi Anti Korupsi harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan, dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental

#### 6. Netralitas

Dalam melaksanakan Survey Persepsi Anti Korupsi, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

### D. Pelaksanaan

Pengukuran/survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus ini dilaksanakan pada bulan April s/d Juni 2026.

### E. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan survei Persepsi Anti Korupsi (IPAK) di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, antara lain:

1. Tim survei menentukan metode survei, yaitu dengan metode kuantitatif dan sampel diambil dengan **Teknik Sampel Morgan dan Krejcie**.
2. Tim survei menyiapkan fasilitas untuk pengambilan responden secara elektronik yaitu 1 komputer /pc, melalui Aplikasi Survey Pelayanan Elektronik (SISUPER) dimana instrument kuesioner pada Aplikasi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
3. Memastikan bahwa computer/pc yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet
4. Membuka browser / peramban halaman website
5. Membuka alamat website :  
<http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id/index.php/pengadilan/099422>
6. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
7. Tim survei menyajikan hasil analisa dalam bentuk analisis statistik deskriptif.

**BAB II**  
**HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI**  
**PENGUNA LAYANAN PENGADILAN**

Kuesioner yang terkumpul dan terisi dengan lengkap pada Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) sejumlah 51 data. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus dan hasil analisis data yang telah dilakukan (lihat lampiran) diketahui bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pada Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **98,63% atau pada nilai 3,95**.

Hasil IPAK tersebut di atas, terdiri dari sepuluh ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.

Tabel 6  
Hasil  
Pengukuran Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan  
di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus

| No  | Unsur Pelayanan        | Nilai Rata-rata |
|-----|------------------------|-----------------|
| U1  | Manipulasi Peraturan   | 3,941           |
| U2  | Penyalahgunaan Jabatan | 4,000           |
| U3  | Menjual Pengaruh       | 3,902           |
| U4  | Transaksi Biaya        | 3,922           |
| U5  | Biaya Tambahan         | 3,941           |
| U6  | Hadiah                 | 4,000           |
| U7  | Transparansi Biaya     | 3,824           |
| U8  | Percaloan              | 3,941           |
| U9  | Perbuatan Curang       | 3,980           |
| U10 | Transaksi Rahasia      | 4,000           |
|     | Total                  | <b>39,45</b>    |
|     | Rata Rata              | <b>3,95</b>     |



Berikut ini 3 unsur terendah pada Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN II TAHUN 2026.

| No. | Ruang Lingkup                     | Indeks | Nilai |
|-----|-----------------------------------|--------|-------|
| 1   | Indikator Transparansi Biaya (U7) | 3,824  | 3.82  |
| 2   | Indikator Menjual Pengaruh (U3)   | 3,902  | 3.90  |
| 3   | Indikator Transaksi Biaya (U4)    | 3,922  | 3.92  |

Adapun Rencana Tindak Lanjut Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN II TAHUN 2026 akan disajikan pada Bab 3.

### BAB III

### RENCANA TINDAK LANJUT

### HASIL SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI

Adapun Rencana Tindak Lanjut yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Makassar untuk meningkatkan pelayanan yaitu sebagai berikut.

| No | Prioritas Unsur                                                                                                          | Program/Kegiatan                                                                                                                             | Tahun 2026  |             |             | Tahun 2026  |             |             | Penanggungjawab         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|
|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                              | Bln.<br>Apr | Bln.<br>Mei | Bln.<br>Jun | Bln.<br>Jul | Bln.<br>Agu | Bln.<br>Sep |                         |
| 1  | Apakah menerima bukti transaksi keuangan/pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan? (U7)     | Memberikan pembinaan setiap pagi dan sore kepada seluruh petugas PTSP agar dalam memberikan pelayanan agar berpedoman pada SOP yang berlaku. | √           | √           | √           | √           | √           | √           | Panitera dan Sekretaris |
| 2  | Pernahkah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat/berkas perkara ? (U3) | Memberikan pembinaan setiap pagi dan sore kepada seluruh petugas PTSP agar dalam memberikan pelayanan selalu menjaga integritas.             | √           | √           | √           | √           | √           | √           | Panitera dan Sekretaris |
| 3  | Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas                 | Memberikan pembinaan setiap pagi dan sore kepada seluruh petugas PTSP agar selalu memahami SOP yang berlaku.                                 | √           | √           | √           | √           | √           | √           | Panitera dan Sekretaris |

|  |                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | layanan di Pengadilan ?<br>(U4) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

**BAB IV**  
**KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis data terhadap data penelitian ini, disimpulkan bahwa Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) pengguna layanan pengadilan di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus sebesar **3,95** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**. Adapun kesimpulan pada masing-masing ruang lingkup sebagai berikut:

- 1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,941**;
- 2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **4,000**;
- 3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,902**;
- 4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks **3,922**;
- 5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks **3,941**;
- 6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **4,000**;
- 7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,824**;
- 8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,941**;
- 9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,980**;
- 10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **4,000**;

**Berikut ini 3 (tiga) unsur terendah pada Hasil Survey Persepsi Anti Korupsi TRIWULAN I TAHUN 2026**

| No. | Ruang Lingkup                     | Indeks | Nilai |
|-----|-----------------------------------|--------|-------|
| 1   | Indikator Transparansi Biaya (U7) | 3,824  | 3.82  |
| 2   | Indikator Menjual Pengaruh (U3)   | 3,902  | 3.90  |
| 3   | Indikator Transaksi Biaya (U4)    | 3,922  | 3.92  |

## B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Makassar TRIWULAN I TAHUN 2026 tersebut di atas, menunjukkan bahwa **mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,3 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi.**

Kepada jajaran manajemen dan seluruh pegawai di Pengadilan Negeri Makassar Kelas I A Khusus, hendaknya meningkatkan pelayanannya khususnya pada ruang lingkup Manipulasi Peraturan, Transaksi Biaya dan Hadiah. Berdasarkan hasil survei ini, ketiga ruang lingkup tersebut berada pada unsur terendah, sehingga untuk melaksanakan pelayanan secara maksimal agar diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Petugas PTSP meningkatkan kedisiplinan dalam mematuhi jam kerja pelayanan di meja PTSP
2. Agar Petugas PTSP memahami SOP pelayanan sehingga dapat memberikan pelayanan lebih baik lagi.
3. Agar Petugas PTSP diberikan pelatihan dan sosialisasi untuk SOP serta penerapan Reward dan Punishment.
4. Agar Petugas PTSP senantiasa menyiapkan checklist di meja PTSP masing-masing

### **RUJUKAN:**

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: KEP/25/M.PAN/ 2/2004 Tentang Pedoman Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Ridwan. 2008. Dasar-dasar Statistik. Penerbit Alfa Beta. Bandung.

Saifuddin Azwar. 2009. Penyusunan Skala Psikologi. Makassar: Pustaka Belajar

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 2. Penerbit ANDI Offset.

Sutrisno Hadi. 2003. Statistik Jilid 3 Penerbit ANDI Offset.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.**



siSUPER

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

+ KEBALAU

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

1. Data Responden

NAMA LENGKAP

PENDIDIKAN \*

Pilih Opsi...

JENIS KELAMIN \*

Pilih Opsi...

DOMISILI \*

Pilih Opsi...

Pilih Opsi...

LANJUTKAN →





sisUPER

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

←

KEMBALI

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

2. Informasi Layanan

JENIS LAYANAN YANG DITERIMA \*

Pilih Opsi...

PERNAH MENERIMA LAYANAN SEBELUMNYA? \*

Pilih Opsi...

←

KEMBALI

LANJUTKAN →

© 2026 Direktorat Jenderal Pradilan Umum



sisUPER

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

← KEMBALI

© 2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

### Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

Tidak Sesuai Prosedur

Jarang Sesuai Prosedur

Sering Sesuai Prosedur

Selalu Sesuai Prosedur

← KEMBALI

Laporan Rencana Tindak Lanjut SPAK Triwulan II Pengadilan Negeri Makassar - 2026



siSUPER

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KEMBALI

© 2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

Pertanyaan 2 dari 10

3. Penilaian Indikator

2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?

Petugas melayani selalu meminta imbalan

Petugas melayani sering meminta imbalan

Petugas melayani jarang meminta imbalan

Petugas melayani tanpa meminta imbalan

← KEMBALI

▶ Pertanyaan Sebelumnya

Laporan Rencana Tindak Lanjut SPAK Triwulan II Pengadilan Negeri Makassar - 2026



siSUPER

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KEMBALI

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

Selesai

Sering

Jarang

Tidak Ada

← KEMBALI

↳ Pertanyaan Sebelumnya

© 2026 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



sisUPER

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

← KEMBALI

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 4 dari 10

4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?

Tidak Pernah

Jarang

Sering

Selalu

← KEMBALI

↳ Pertanyaan Sebelumnya



siSUPER

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

← KEMBALI

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 5 dari 10

5. Apakah di Pengadilan selalu membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

Tidak Pernah

Jarang

Sering

Selalu

← KEMBALI

↳ Pertanyaan Sebelumnya

© 2026 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum



sisUPER

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

+ KEMBALI

© 2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Penanyaan 6 dari 10

6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan ( meskipun tidak diminta ) ?

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

← KEMBALI

↳ Penanyaan Sebelumnya

Laporan Rencana Tindak Lanjut SPAK Triwulan II Pengadilan Negeri Makassar - 2026



sisUPER

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KEMBALI

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 7 dari 10

7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ? ( Untuk pelayanan yang dipungut biaya / PNBP )

Tidak Pernah

Jarang

Sering

Selalu

← KEMBALI

Pertanyaan Sebelumnya

Laporan Rencana Tindak Lanjut SPAK Triwulan II Pengadilan Negeri Makassar - 2026





sisUPER

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

←

KEMBALI

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 8 dari 10

8. Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

←

KEMBALI

↻

Pertanyaan Sebelumnya

© 2026 Direktorat Jenderal Badan Pengadilan Umum



siSUPER

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KEMBALI

© 2026 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 9 dari 10

9. Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

← KEMBALI

Pertanyaan Sebelumnya

Laporan Rencana Tindak Lanjut SPAK Triwulan II Pengadilan Negeri Makassar - 2026



siSUPER

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KEMBALI

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

3. Penilaian Indikator

Pertanyaan 10 dari 10

10. Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?

Selalu

Sering

Jarang

Tidak Ada

← KEMBALI

↳ Pertanyaan Sebelumnya



sisUPER

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

KEMBALI

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

Hampir Selesai!

Mohon berikan kesan & pesan singkat untuk kami.

KESAN & PESAN \*

Tuliskan di sini...

SIMPAN DATA

KEMBALI

Laporan Rencana Tindak Lanjut SPAK Triwulan II Pengadilan Negeri Makassar - 2026



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jln. R.A. Kartini No. 18/23 KOTA MAKASSAR

SULAWESI SELATAN

<http://www.pn-makassar.go.id/>



SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS BERJALAN

3,95 / 98,63 %

JUMLAH

51 RESPONDEN

GENDER

Laki-Laki : 34 org

Perempuan : 17 org

PENDIDIKAN

Tidak/Belum Sekolah : 0 org

Diploma 2 : 0 org

SD : 0 org

Diploma 3 : 1 org

SMP : 2 org

Sarjana S1 : 29 org

SMU : 9 org

Magister S2 : 9 org

Diploma 1 : 0 org

Doktor S3 : 1 org

PEKERJAAN

PNS : 3 org

Wiraswasta : 9 org

TNI : 0 org

Wirausaha : 5 org

Polri : 1 org

Tenaga Kontrak : 3 org

Lainnya : 30 org

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Rata-Rata per Unsur:

1. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?

3.82

2. Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ?

3.90

3. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan ?

3.92